

PENOLAKAN KOREA UTARA TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN LEE MYUNG BAK MENGENAI PERLUCUTAN
PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA

Disusun Oleh :

Ria Purnamasari

151080203

Abstract

Hubungan kedua Korea yang mulai membaik kembali memanas semenjak diangkatnya Presiden Lee Myung Bak pada 20 Desember 2007. Lee Myung Bak mendapat kemenangan besar dalam pemilihan presiden di Korea Selatan, dan sekaligus mengakhiri pemerintahan liberal yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Lee mengatakan, ia akan mengambil sikap yang lebih kritis terhadap Korea Utara dibanding pemerintahan sebelumnya. Katanya, bantuan bagi Korea Utara akan dikaitkan sepenuhnya pada penghentian program nuklir negara itu. Lee Myung Bak memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dari para pendahulunya dalam menilai dan menyikapi Korea Utara. Dalam pemerintahannya, Lee Myung Bak menerapkan kebijakan bebas nuklir dan pintu terbuka terhadap Korea Utara yang berdasarkan pada hubungan timbal balik. Lee Myung Bak sebagai pengganti Roh Moo Hyun mewarisi tugas denuklirisasi Korea Utara yang belum selesai. Pemerintahan Lee melakukan dua pendekatan terhadap Korea Utara. Pertama, mengusulkan "*De-nuke, Open 3.000*," yaitu jika Korea Utara melakukan denuklirisasi, Korea Selatan akan menaikkan pendapatan perkapita-nya hingga 3000 US\$ selama sepuluh tahun untuk memfasilitasi reformasi di Korea Utara. Kedua, Pemerintahan Lee akan tetap bergantung pada *Six Party Talks* sebagai jalan diplomatik untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara. Korea Utara tetap mempertahankan rezim kediktatorannya dengan menolak usulan "*De-Nuke, Open 3.000*" karena merasa bahwa Korea Selatan telah berusaha menghancurkan rezim dengan permintaan reformasinya. Di lain sisi, Korea Utara juga menolak dan ingin melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap *Six Party Talks*.